

KONSEP LEBENSRAUM: PEREBUTAN HEGEMONI LAUT CHINA SELATAN ANTARA CHINA DENGAN AMERIKA SERIKAT

Oleh :

Hadistian¹⁾, Panji Suwarno²⁾, Supriyadi³⁾

^{1,2,3}Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan

¹email: Hadistian8@gmail.com

²email: Panji.suwarno@idu.ac.id

³email: Supriyadi@idu.ac.id

Abstrak

Konsep lebensraum atau ruang hidup yang diperkenalkan Ratzel berkembang sebagai kajian geopolitik modern. Artikel ini berupaya menganalisis konsep lebensraum pada strategi Tiongkok dan reaksi Amerika Serikat serta menganalisis jalan tengah dalam menyelesaikan konflik di Laut China Selatan. Metode penelitian yang digunakan ialah kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Pengumpulan data bersumber dari berbagai sumber pustaka yang memiliki koreasi dengan topik penelitian. Dari penelitian ini diketahui bahwa implementasi BRI yang dilakukan oleh China merupakan sebuah langkah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di negaranya pada masa yang akan datang. Amerika Serikat, melalui strategi *rebalancing*, berupaya membendung hegemoni Tiongkok. Sebagai jalan tengah antara Amerika Serikat dan China, ASEAN memperkenalkan AOIP sebagai kerangka kerja sama antar negara yang memiliki kepentingan di Laut China Selatan.

Kata Kunci: Lebensraum, China, Amerika Serikat, Laut China Selatan

1. PENDAHULUAN

Laut China Selatan hingga saat ini masih memiliki konflik yang belum dapat diselesaikan hingga tuntas. Kepentingan setiap negara atas wilayah Laut China Selatan memberikan dampak terhadap keseimbangan politik di kawasan Asia Tenggara dan Asia Pasifik. Sejak beberapa dekade sebelumnya China telah mengakui secara sepihak bahwa Laut China Selatan merupakan kawasan berdaulatnya. Pengakuan ini menimbulkan pertentangan dengan beberapa negara di Asia Tenggara yang bersengketa di laut tersebut.

China telah bertransformasi menjadi kekuatan utama global semenjak kejatuhan Uni Soviet. Kemajuan teknologi serta finansial memberikan dampak terhadap peningkatan alutsista militer China. Perkembangan China di Asia Pasifik memiliki implikasi terhadap kecenderungannya menjadi negara *Super Power* (Satrio, 2015). Kekuatan China turut ditopang dengan penggunaan strategi diplomasi dalam membangun hubungan diplomatik. Strategi *chequebook diplomacy* di jalan China melalui pemanfaatan kekuatan ekonomi dengan memberikan bantuan bagi kebutuhan negara tujuan (Sigit & Herindrasti, 2020).

Kekuatan China di kawasan Asia Pasifik terutama Laut China Selatan menimbulkan rasa khawatir bagi Amerika Serikat. Perkembangan China yang semakin pesat dianggap sebagai sebuah ancaman terhadap hegemoni Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik. Stabilitas Laut China Selatan menjadi tujuan utama bagi Amerika Serikat dalam menopang kepentingan nasionalnya. Kawasan yang menjadi sengketa antara China dengan beberapa

negara Asia Tenggara merupakan area strategis bagi mobilitas pasukan militer Amerika Serikat (Belo, Mamentu, & Tulung, 2020). Melihat hegemoni China di kawasan strategis tersebut Amerika Serikat melakukan *rebalancing* kekuatan militernya dari US Central Command menuju US Indo Pacific Command.

Strategi *rebalancing* atau *pivot to asia* bersifat luas, tidak terbatas pada pertahanan militer tetapi turut memasukkan unsur ekonomi, sosial, politik serta diplomasi dalam menghadapi risiko ancaman dari negara lain (Planifolia, 2017). Pemidahan kekuatan sebagai langkah dalam mempertahankan hegemoni Amerika Serikat di dunia. Kawasan Laut China Selatan menjadi perebutan dikarenakan letaknya yang strategis sebagai kawasan lalu lintas perkapalan. Selat Malaka diketahui sebagai area selat paling sibuk setelah Hormuz yang berada di Laut China Selatan (Hendrajit, 2017).

Selat Malaka bagi China menimbulkan sebuah dilema atas ketergantungannya terhadap wilayah tersebut. Ketergantungan China diketahui atas kebutuhan akan impor minyaknya yang sebesar 80% untuk memenuhi kebutuhan industri dalam negerinya (Rahmadani, Kusmanto, & Warjio, 2019). *Malacca Dilemma* yang dirasakan oleh China berupaya diatasi melalui pengurangan ketergantungan impor, efisiensi energi, pemanfaatan sumber energi alternatif, investasi pembangunan jaringan pipa melalui Selat Malaka dan pembangunan kekuatan angkatan laut dalam pengamanan Sea Lane of Communications (SLOCs) Selat Malaka (Storey, 2006). Pembangunan kekuatan angkatan laut serta alternatif lainnya sebagai jawaban atas ancaman dari

Amerika Serikat yang memiliki proxy di negara yang berdekatan dengan Selat Malaka.

Friedman menjelaskan bahwa perkembangan dunia saat ini semakin mengecil serta hubungan antar negara semakin dekat. Sistem sosial serta ketergantungan satu sama lain menciptakan kerja sama untuk mengatasi konflik (Kamal, Kamal, Idris, & Othman, 2017). China melakukan kerja sama dalam mengatasi konflik yang mungkin saja terjadi melalui konsep Belt Road Initiative (BRI) yang bertujuan membuka kembali jalur sutera. Konsep BRI kemudian berkembang dan mencakup rute jaringan kereta api baru, pelabuhan, jaringan pipa, jaringan listrik dan jalan raya di berbagai negara (Verianto, 2019). Pelaksanaan BRI akan menggabungkan hampir 60 negara di dunia melalui konsep pinjaman serta penyediaan jaringan yang ekspansif oleh China. Jalur BRI dibentuk melalui dua jalur besar yakni 21st Century Maritime Silk Road dan Silk Road Economic Initiative. Berbagai pinjaman digelontorkan oleh China demi mencapai tujuan strategis tersebut.

Amerika Serikat memandang konsep tersebut dengan penuh kekhawatiran akan adanya kebangkitan China. Kebangkitan ekonomi, politik serta militer berupaya ditanggulangi oleh Amerika Serikat melalui strategi Indo-Pasifik. Kebijakan yang dikenal dengan *Free and Open Indo-Pacific Strategy* yang memiliki tujuan untuk menahan laju China, mempertahankan ketertiban kawasan, peningkatan keamanan melalui kerangka kerja *Quadrilateral Security Dialogue (QUAD)*, berjalannya perdagangan bebas yang adil, meningkatkan konektivitas melalui pembangunan infrastruktur sebagai alternatif BRI, dan menjaga kebebasan dalam bernavigasi (Heiduk & Wacker, 2020)

Kehadiran Amerika Serikat pada konflik Laut China Selatan membawa ketegangan baru di kawasan Asia Tenggara. Sebagai wilayah yang bersinggungan langsung dengan area konflik negara-negara di Asia Tenggara melalui *Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)* mencari jalan tengah dalam menyelesaikan sengketa. Ketidakberpihakan menjadi modal utama dalam menyelesaikan perebutan hegemoni antara kedua negara tersebut. Berbagai upaya telah dilakukan dengan penepatan *code of conduct (CoC)* dalam bersikap di Laut China Selatan. Perumusan *CoC* diprakarsai oleh ASEAN bersama dengan China, sehingga konsep tersebut seyogyanya dihormati dan diakui (Muhamad, 2020). Amerika Serikat sebagai mitra strategis yang memiliki kepentingan di Laut China Selatan turut diwajibkan mengikuti *CoC* yang telah dibentuk. Perjanjian *CoC* saat ini telah berkembang menjadi *ASEAN Outlook on Indo Pacific (AOIP)* untuk menjadikan ASEAN sebagai sentralitas dalam menyelesaikan konflik secara damai dengan mengedepankan diplomasi.

Konflik yang terjadi di Laut China Selatan sejatinya merupakan perebutan akan kepentingan nasional. China maupun Amerika Serikat berupaya untuk menjadi negara yang mendominasi kawasan

tersebut. Konflik kedua negara membawa kekhawatiran serta ketegangan bagi beberapa negara yang berada di sekitar kawasan sengketa. Keinginan China menghegemoni kawasan dapat dikatakan sebagai bentuk perebutan ruang hidup (*lebensraum*) sebagaimana yang disampaikan oleh Frederich Ratzel. Setiap bangsa akan bertumbuh sejalan dengan pertumbuhan penduduk, kemajuan budaya, meluasnya perdagangan dan meningkatnya kekuatan sebuah negara. Atas dasar konsep tersebut, artikel ini bertujuan menganalisis konflik yang terjadi antara China dengan Amerika Serikat dalam menghegemoni kawasan Laut China Selatan yang merupakan penerapan dari konsep *lebensraum*, serta jalan tengah dalam menyelesaikan sengketa antar dua negara tersebut.

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini metode yang digunakan ialah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka. Pelaksanaan studi kepustakaan dilakukan dengan menghimpun informasi yang relevan berkaitan topik ataupun masalah penelitian yang sedang dikaji (Purwono, 2008). Studi pustaka dapat digunakan mengeksplorasi serta memberikan gambaran umum tentang masalah pada suatu penelitian. Dalam pelaksanaan studi pustaka terdapat empat tahap untuk melakukan analisis yakni merancang topik yang ingin diulas, mencatat hasil ulasan, menganalisis, dan menulis kembali hasil kajian (Snyder, 2019). Pengumpulan data bersumber dari jurnal, buku, internet serta literatur lainnya yang memuat topik penelitian. Teori serta informasi yang didapatkan menjadi sumber ide serta gagasan atau pemikiran yang dapat memperkaya kajian dalam penelitian. Data yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Lahirnya Konsep Lebensraum

Pemahaman mengenai ruang hidup bagi suatu negara diperkenalkan oleh Frederich Ratzel yang merupakan seseorang ilmuwan dari Jerman. Dalam pikiran Ratzel sebuah negara sebagaimana layaknya organisme yang berkembang dan membutuhkan ruang dalam menunjang perkembangannya. Fase tahap sebuah negara berlangsung melalui proses lahir, tumbuh berkembang, mempertahankan diri, menyusut hingga mengalami kematian. Upaya menjaga eksistensi suatu negara dilakukan melalui ekspansi yang dapat memenuhi kebutuhan penduduk. Ratzel beranggapan kehebatan suatu bangsa terlahir dari keunggulan budaya yang mempengaruhi kebutuhan sumber daya alam dan memaksa dilakukannya ekspansi wilayah (Calam & Sobirin, 2009).

Ruang menjadi faktor penting untuk memperoleh makanan sebagai sumber penghidupan bagi setiap entitas makhluk hidup. Ratzel melabeli konsep tersebut sebagai *lebensraum* (ruang hidup). Konsep *lebensraum* diketahui memiliki korelasi

terhadap pemikiran Thomas Malthus mengenai pertumbuhan penduduk dan pangan (Bassin, 1987). Pada konsep Malthus diperkenalkan bahwa pertumbuhan penduduk yang tidak terkontrol akan berkembang secara deret ukur, sedangkan kebutuhan penghidupan manusia yakni pangan bertumbuh dalam deret hitung (Malthus, 1798).

Lahirnya pemahaman tentang *lebensraum* (ruang hidup) juga tidak terlepas dari pengaruh konsep Darwin. Pemikiran Darwin yang tertuang pada karyanya *On the Origin of Species by Means of Natural Selection* telah mempengaruhi pemikiran geographer Jerman selama paruh abad ke-19. Pendahulu Ratzel yakni Oscar Peschel memperkenalkan konsep Darwin dalam ilmu geografi dengan istilah *lebensraum*.

Peschel melihat bahwa konsep tersebut berkaitan erat mengenai seleksi alam. Bagi Ratzel pemikiran Darwin merupakan bukti dari adanya perebutan kehidupan sebagai dasar dari adanya evolusi (Abrahamsson, 2013). Pemahaman yang diterima Ratzel mewujudkan dirinya untuk menuliskan esai berjudul *Sein und Werden der Organischen Welt* yang bertujuan mempromosikan serta memperkenalkan pemikiran Darwin.

Ratzel memperkenalkan *lebensraum* sebagai suatu faktor seragam yang mendasari perubahan biologis dan hubungan antara spesies hidup serta lingkungannya. Konsep *lebensraum* yang dikembangkan oleh Ratzel menjadi dasar dari adanya teori mengenai *state power and extension* yang dikenalkan Rudolph Kjellen. Pada teori tersebut tercatat tiga prasyarat utama untuk menjadi negara dengan kekuatan besar yakni kebebasan bertindak, kuatnya hubungan internal, dan kebebasan bermobilisasi. Teori-teori tersebut yang membawa Jerman melakukan ekspansi wilayah (Djalal, 1986).

Perebutan ruang hidup dalam pandangan Ratzel sebagai sebuah upaya untuk mengelola sumber daya dengan baik. Hal ini didasarkan atas ketidakmampuan penduduk asli untuk mengelola sumber daya alam dan merupakan sebuah ancaman bagi ketersediaan kebutuhan hidup masyarakat (Danielsson, 2009). Pandangan pesimis tersebut menimbulkan ancaman kedaulatan bagi negara yang belum mampu mengelola dengan baik sumber daya alamnya. Dalam upaya perebutan ruang hidup Ratzel memperkenalkan tujuh cara dalam memperluas ruang hidup (*lebensraum*) suatu negara yang dikenal dengan *the laws of the spatial growth of states*.

Ratzel dalam *the laws of the spatial growth of states* menjelaskan bahwa untuk menguasai wilayah lain disebabkan oleh motif spasial yang berasal dari tiga tendensi yakni *enlargement, reproduction, dan establishment*. Dalam melakukan motif tersebut Ratzel memberikan tujuh tahapan pertumbuhan spasial sebuah negara yang terdiri dari (Ratzel, 2019):

1. Pertumbuhan negara beriringan dengan kemajuan budaya.

2. Pertumbuhan negara mengikuti kebutuhan masyarakat dengan mengedepankan pertumbuhan negara.
3. Pertumbuhan negara dilakukan dengan menganeksasi negara kecil dan pada saat yang sama keterikatan penduduk terhadap tanah air menjadi lebih kuat.
4. Batas negara merupakan bagian pinggir dari sebuah negara yang membawa pertumbuhan serta sebagai pertahanan dan merupakan bagian dari kehidupan negara.
5. Pertumbuhan sebuah negara harus mengambil posisi politik yang menguntungkan.
6. Stimulus pertama untuk mengembangkan suatu wilayah berada dari luar.
7. Kecenderungan aneksasi wilayah menular dari satu wilayah ke wilayah lain dengan intensitas yang selalu meningkat.

Ratzel melalui konsep ini tidak melakukan justifikasi bahwa ekspansionisme sebagai suatu keharusan untuk dilakukan. Proses pertumbuhan ruang dalam memenuhi kebutuhan hidup merupakan tindakan alami dan sepenuhnya perlu dilakukan (Jones et al., 2015).

Hegemoni China di Laut China Selatan

China melalui sebuah peta yang bersumber dari tahun 1947 membawa dampak sengketa wilayah Laut China Selatan (LCS) hingga saat ini. Garis putus-putus yang membentuk pola U melingkupi beberapa pulau utama di Laut China Selatan seperti Kepulauan Pratas, Kepulauan Paracel, *Macclesfield Banks*, dan Kepulauan Spratly. Garis putus-putus (*nine-dashed line*) turut mencakup Karang James yang berada di Selatan (Jinming & Dexia, 2003). Peta yang mencakup *nine dash line* memberi dampak sengketa terhadap wilayah perairan di LCS antara China dengan Vietnam, Thailand, Malaysia, Brunei Darussalam, Indonesia, Filipina dan Taiwan. China beranggapan bahwa *nine-dashed line* merupakan wilayah mereka sejak zaman dahulu (Waluyo, 2020).

Kepulauan Spratly menjadi permasalahan pelik bagi beberapa negara yang bersengketa dengan China. Kondisi kawasan tersebut bukan sebagai kawasan yang layak untuk dihuni oleh manusia. Potensi sumber daya alam serta letak yang strategis akibat lalu lintas laut menjadikan Kepulauan Spratly sebagai sumber sengketa utama di kawasan LCS (Farhana, 2014). Sejak dahulu wilayah Kepulauan Spratly dikenal sebagai daerah penangkapan ikan yang kaya dan saat ini menjadi sumber konflik antara beberapa negara. Perdana Menteri Wen Jiabao melalui ungkapannya yakni “Wilayah sejarah China sejak zaman kuno” turut memperjelas klaim atas wilayah yang disengketakan (Malik, 2013).



Gambar 1. Wilayah Klim *Nine Dash Line* China di Perairan Laut China Selatan (Mirski, 2015).

Klaim China dilakukan melalui bukti arkeologis yang menjelaskan bahwa pemanfaatan LCS telah menjadi bagian darinya sejak zaman dahulu (Mirski, 2015). China membangun kekuatan militer pada kawasan yang disengketakan untuk meraih pengakuan atas klaim tersebut. Strategi militer China dilandasi konsep “Perbatasan Strategis” yang ditentukan oleh kekuatan militer. Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe menilai tindakan tersebut sebagai suatu yang berbahaya. Tindakan China seolah dianggap seperti penggunaan prinsip dasar Adolf Hitler yang menggunakan konsep lebensraum (Patnistik, 2010).

Peningkatan kekuatan militer China pada kawasan yang disengketakan tidak berarti akan menggunakan kekuatannya untuk memulai sebuah peperangan. Hal ini dikarenakan kebijakan pertahanan negara China lebih mengedepankan pertahanan nasional yang defensif. Strategi China dibangun melalui konsep pembangunan damai dan harmoni sebagai dasar kebijakan luar negerinya (The State Council Information Office of the People’s Republic of China, 2019).

Negara Tirai Bambu tersebut berupaya membangun lebensraum maritimnya sendiri pada kawasan Laut China Selatan. Tindakan China untuk melakukan hegemoni terhadap area yang disengketakan tidak terlepas dari kejadian masa lalu, saat bangsa Barat menyerang China melalui perairan tersebut. Faktor tersebut disertai dengan upaya pemenuhan kebutuhan dasar sumber daya alam bagi peningkatan ekonomi dalam negerinya (Carpio, 2020). Atas dasar tersebut China melakukan penguatan serta penempatan armada militer lautnya di perairan LCS. Penempatan militer China di LCS ditopang dengan pembangunan pangkalan militer melalui proses reklamasi pada beberapa pulau serta karang di Kepulauan Spratly yang disengketakan.

Strategi militer yang defensif menjadikan China memilih memperkuat kekuatan armada militernya. China juga memperkenalkan strategi diplomasi dalam upaya mempengaruhi beberapa negara kawasan. *Strategi Belt Road Initiative (BRI)* sebagai langkah China untuk menggunakan kekuatan perekonomiannya serta diplomasi dalam mempengaruhi beberapa negara. Langkah-langkah yang dijalankan oleh China dalam mewujudkan hegemoni di kawasan tersebut lebih dikenal sebagai strategi *smart force*.

Presiden China, Xi Jinping memperlihatkan kemampuan negaranya dalam menggunakan *smart force* demi kepentingan nasionalnya. Kemampuan *smart force* melalui diplomasi telah ditunjukkan China ketika berhasil membantu negosiasi terhadap Organisasi Kemerdekaan Kachin di Myanmar. Operasi tersebut tidak terlepas dari tujuan China untuk mencegah gelombang pengungsi ke China, menjaga stabilitas kawasan perbatasan serta mencegah ancaman terhadap warga sipilnya yang berbatasan dengan Myanmar (Cook, 2013). Strategi tersebut juga diarahkan pada konsep BRI untuk mencapai tujuan jangka panjang China.

Strategi BRI merupakan rencana ambisius dari Presiden China, Xi Jinping yang diumumkan pada tahun 2013 dengan membangun *Silk Road Economic Belt* dan *21st Maritime Silk Road Initiative* (Yunus, 2018). Kebijakan ini berusaha menghubungkan rute perdagangan masa lampau China yang mencakup Asia, Eropa dan Afrika. Secara keseluruhan rute yang terhubung akan mencapai 2/3 populasi dunia dan menghasilkan 1/3 dari Pendapatan Domestik Bruto dunia.



Gambar 2. Rute Jalur Sutera Dalam Strategi BRI (Leer & Yau, 2016)PW

Pelaksanaan *Maritime Silk Road Initiative* yang dijalankan China akan menghubungkannya dengan Asia Tenggara, Asia Selatan, Afrika, Timur Tengah dan Eropa. Dalam mencapai tujuan tersebut dibangun sebuah kebijakan kerangka kerjasama dan diplomasi untuk pembangunan infrastruktur melalui *Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)* yang merupakan kepanjangan tangan dari kebijakan BRI. China mempercayai penggunaan *soft power* melalui

pendekatan diplomasi dan perekonomian akan mampu mengembangkan perekonomian dalam negerinya (Ferdinand, 2016).

Pelaksanaan *Maritim Silk Road Initiative* dapat dilihat sebagai sebuah upaya membangun kembali kejayaan jalur maritim sebagaimana yang terjadi pada era dinasti China. Kawasan Asia Tenggara dahulu menganut sistem hirarki dan tunduk kepada pimpinan China dalam upaya mengakses pasar yang sangat besar (Robbins, 2017). Strategi tersebut yang menjadi harapan China untuk menguasai serta mencapai kemakmuran kembali sebagaimana sebelum era kolonialisasi Jepang dan imperialisme barat.

Proyek BRI menemui hambatan dengan adanya sengketa wilayah di Laut China Selatan. Hal ini dikarenakan keberhasilan proyek tersebut harus melalui beberapa negara di Asia Tenggara, termasuk area yang dipersengketakan. Sebanyak 10 anggota *Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)* telah bergabung AIIB untuk mengambil keuntungan perekonomian. Seiring perkembangan waktu dengan adanya ketegangan LCS serta peningkatan kekuatan militer China, kebijakan BRI lebih dipandang sebagai sebuah strategi geopolitik China dibandingkan kerja sama ekonomi (Zhang, 2015).

China menyadari ketegangan yang timbul perlu diredam demi mencegah munculnya aliansi anti-China. Pendekatan secara diplomatis melalui perekonomian tetap dijalankan serta menurunkan ketegangan pada wilayah yang disengketakan. China setidaknya telah mampu mempengaruhi beberapa negara di kawasan Asia Tenggara untuk meletakkan pangkalan militernya. Melalui pendekatan pendanaan pinjaman lunak dari AIIB, China membangun infrastruktur untuk penggunaan yang strategis. Kamboja menjadi salah satu negara yang bekerja sama dengan China dan secara tidak langsung membangun Pangkalan Angkatan Laut di Ream (Foulkes & Wang, 2019). Proyek ini akan meningkatkan kekuatan China pada area yang disengketakan.

Proses kerja sama yang dilakukan China turut dilakukan dengan Myanmar melalui pendanaan infrastruktur. Ketergantungan terhadap China semakin besar dirasakan ketika sanksi internasional semakin dirasakan oleh Myanmar. Condongnya Myanmar kepada China timbul atas sanksi ekonomi Amerika Serikat (Darmawan & Mahendra, 2018). Kerjasama militer turut dijalankan dengan memberikan akses kepada pangkalan angkatan lautnya di Pulau Hianggy. Myanmar semakin memperjelas posisinya dengan memberikan dukungan kepada China atas persoalan sengketa di LCS.

Dalam meningkatkan pengaruhnya di kawasan yang disengketakan, China terus melakukan manuver kerja sama kepada beberapa negara Asia Tenggara. Brunei turut menjadi salah satu target kerja sama China dalam membangun pangkalan militer di Timur

(Rabbani, 2019). Brunei melihat China sebagai pasar potensial setelah sumber daya alam hidrokarbonnya semakin menipis (Darmawan & Mahendra, 2018). Hal ini yang menjadikan cenderung Brunei bersifat pasif terhadap sengketa di LCS. Kerja sama yang dilakukan oleh China dengan Brunei sebagai bukti ekspansi militer demi mencegah negara lain mempengaruhi kawasan LCS.

Upaya Amerika Serikat Membendung Hegemoni China

Perkembangan China pada bidang ekonomi serta militer memberi kekhawatiran bagi Amerika Serikat. Peningkatan militer serta ekonomi dipandang sebagai suatu kebangkitan China saat ini. Bahkan beberapa peneliti melihat China dapat berkembang menjadi sebuah super power baru menggantikan Uni Soviet yang telah runtuh setelah perang dingin. Amerika Serikat memandang hegemoni LCS yang dilakukan China sebagai sebuah ancaman. Bagi Amerika Serikat penguasaan laut merupakan faktor penting dalam memainkan perannya di percaturan global.

Alfred Thayer Mahan yang merupakan seorang perwira laut Amerika Serikat menjelaskan bahwa penguasaan laut merupakan prasyarat penting bagi kejayaan suatu bangsa (Soebijanto, 2004). Pemikiran Mahan yang menekan kepada pembangunan sea power tidak hanya sebatas pada penguatan armada militer angkatan laut saja. Ekonomi termasuk pada salah satu upaya agar suatu bangsa mencapai dominan di laut melalui tiga langkah yakni produksi barang, pembangunan angkatan laut yang dapat melindungi pengangkutan barang dan pembentukan sebuah koloni yang dapat menyediakan bahan baku serta menciptakan pasar yang luas (Mahan, 2010). Pemikiran Mahan mempengaruhi Amerika dalam mengambil kebijakan luar negerinya, tentu atas pertimbangan kepentingan nasional yang diinginkannya (Varacalli, 2016).

Amerika Serikat memiliki kepentingan pada kawasan yang disengketakan China dengan beberapa negara di Asia Tenggara dan Taiwan. Bagi Amerika Serikat hegemoni China akan membawa dampak terhadap perdagangan lautnya yang mencapai 90%. Penguasaan oleh China akan berupaya dilawan oleh Amerika Serikat terutama pada kawasan Laut China Selatan, Laut China Timur dan Laut Kuning yang menghubungkannya dengan Asia Timur (Gompert, 2013). Melihat upaya China yang ingin melakukan hegemoni pada kawasan tersebut, Amerika melakukan strategi *rebalancing* dalam mengerahkan kekuatan militernya ke kawasan sengketa di Laut China Selatan.

Kebijakan *rebalancing* dipilih Amerika Serikat mengingat fokus permasalahan dari kawasan Timur Tengah berpindah pada Asia Pasifik, khususnya yang berkaitan dengan China. Penarikan kekuatan militer Amerika Serikat dilakukan dengan strategi 60% ditarik menuju the *United States Indo Pacific Command (USINDOPACOM)*, sedangkan

40% disebar pada komando lainnya (Planifolia, 2017). Perubahan fokus kekuatan diiringi dengan langkah kebijakan merangkul sekutu lama Amerika Serikat di kawasan Indo Pasifik.



Gambar 2. Area Tanggung Jawab USPACOM (Keating, 2008)

Pemindahan kekuatan militer yang dimiliki Amerika Serikat memiliki implikasi semakin tegangnya situasi kawasan LCS. Beberapa peneliti menganggap kebijakan tersebut sebagai upaya untuk menyeimbangkan kekuatan China di LCS. Amerika Serikat turut membangun diplomasi kepada beberapa negara yang memiliki sengketa langsung terhadap China. Selama 25 tahun kebijakan Amerika Serikat dalam menghadapi China dilakukan melalui kombinasi *engaging* dan *hedging* (Kartini, 2015).

Strategi *engaging* diartikan sebagai sebuah langkah Amerika Serikat dengan menjadikan China untuk mau mematuhi aturan internasional yang ditetapkan dunia barat setelah Perang Dunia II. Pelaksanaan strategi *hedging* dijalankan dengan mengkonsolidasi posisi Amerika Serikat melalui aliansi jaringan serta kemitraan dalam menekan kemajuan China pada bidang diplomasinya.

Hegemoni China terhadap LCS dianggap sebagai ancaman pada *Freedom of Navigation* (FoN) Amerika Serikat. Sebagai negara yang tidak meratifikasi UNCLOS tindakan tersebut dianggap sebagai sebuah kewajiban, sedangkan China yang meratifikasi UNCLOS telah melanggar konvensi tersebut. Kebijakan FoN Amerika Serikat dilaksanakan sebagai langkah untuk mempertahankan akses tanpa hambatan di perairan LCS. Amerika Serikat memiliki kepentingan atas jalur perdagangan yang aman serta mempertahankan pengaruhnya di kawasan Asia Pasifik (Bidara & Mamentu, 2018). Kepentingan tersebut yang berupaya dipertahankan oleh Amerika Serikat melalui konsep FoN di LCS.

Amerika Serikat turut melakukan diplomasi serta kerja sama dengan beberapa negara yang memiliki konflik dengan China. Pada pelaksanaan rebalancing kekuatan ke Asia Pasifik, Amerika Serikat mengembangkan potensi diplomasi melalui kerja sama dengan sekutu lama di kawasan. Australia menjadi salah satu negara mitra Amerika Serikat

yang berdekatan dengan LCS untuk menempatkan pasukan militer dalam membendung China. Kerja sama lainnya dilakukan dengan menggandeng negara Filipina serta Vietnam.

Filipina bersama Amerika Serikat telah meratifikasi *Visiting Forces Agreement* (VFA) pada tahun 1999. Hal tersebut bertujuan untuk pemberian izin atas adanya kekuatan militer Amerika Serikat di Filipina serta pelaksanaan latihan militer bersama di LCS (Ramadani & Trisni, 2019). Vietnam turut menjadi bagian dari kerja sama dengan Amerika Serikat melalui peningkatan penjualan senjata serta pelatihan militer angkatan laut secara bersama. Peningkatan kerja sama ini tidak terlepas dari adanya gangguan China atas perusahaan minyak Amerika Serikat di lepas pantai Vietnam pada tahun 2008 (Bidara & Mamentu, 2018).

Strategi dilomasi Amerika Serikat yang menggandeng kembali sekutu lamanya berupaya mengepung China diberbagai sisi. *The Quadrilateral Security Dialogue* (QSD) yang berisikan Australia, Jepang, India dan Amerika Serikat berawal dari pertemuan informal dalam membantu negara yang menghadapi dampak Tsunami Samudera Hindia tahun 2004. Kerja sama tersebut diaktifkan kembali dalam menghadapi China yang berupaya melakukan hegemoni di LCS (Anshori, 2020). Kini pengaktifkan kembali QSD dilakukan sebagai sarana bertukar pandangan mengenai tantangan serta dinamika keamanan kawasan khususnya Indo-Pasifik (Kliem, 2020). Terbentuknya QSD berupaya membangun pemahaman mengenai *free and open Indo-Pacific*, sehingga tidak diperbolehkan satu negara manapun untuk menguasai area tersebut. Upaya ini tentu tidak lain sebagai sebuah tindakan melemahkan China dalam berupaya melakukan hegemoni di kawasan LCS yang termasuk bagian dari Indo-Pasifik.

Jalan Tengah Meredam Perebutan Hegemoni Laut China Selatan

Konflik yang terjadi di LCS tentu akan membawa dampak terhadap keamanan serta stabilitas kawasan. Laut China Selatan yang menjadi area perebutan antar beberapa negara selalu menjadi perbincangan hingga saat ini. Lahirnya QUAD sebagai sebuah upaya membendung hegemoni China menambah kekhawatiran negara-negara di kawasan LCS. Kekhawatiran ini dipicu dari adanya konflik terbuka yang dapat saja terjadi sewaktu-waktu, mengingat kepentingan China begitu besar di LCS untuk konsep BRI yang dijalanannya. Kehadiran QUAD yang beranggotakan Amerika Serikat, Jepang, India dan Australia mengundang reaksi negatif dari China. Hal ini diakibatkan dari tujuannya yang mengarah pada kawasan Indo-Pasifik yang terbuka, bebas dan inklusif (Kien, 2020).

Sebagai pemecahan masalah yang terjadi di kawasan Laut China Selatan mengenai perebutan hegemoni antara China dengan Amerika Serikat, ASEAN menerapkan konsep *ASEAN Political-Security Community* (APSC). Pada awalnya ASEAN

bukan sebagai organisasi keamanan, tetapi kini negara anggota dapat melakukan kegiatan terkait keamanan secara bilateral maupun multilateral (Bangun, 2021). Dalam upaya memecahkan masalah ASEAN telah memulainya sejak 22 Juli 1992 dengan mengeluarkan *ASEAN Declaration on the South China Sea* yang ditandatangani bersama seluruh anggota ASEAN.

Prinsip yang dibangun pada kerja sama tersebut berkaitan dengan penyelesaian sengketa secara damai dan mendorong kerja sama antar anggota ASEAN. Kerangka kerja sama kemudian berkembang pada tahun 2002 dengan disepakatinya *Declaration of the Conduct of Parties in the South China Sea (DoC)* antara ASEAN dengan China (Toruan, 2020). Salah satu isi deklarasi tersebut berkaitan dengan komitmen terhadap prinsip Piagam PBB, UNCLOS 1982 dan prinsip hukum internasional yang dijadikan sebagai landasan hubungan antar negara.

Pembentukan DoC masih tidak mampu meredakan sengketa yang terjadi di Laut China Selatan. Kerangka DoC dibentuk dalam tataran *soft law* yang didesain untuk mencapai legalisasi yang lebih kuat (Haryanto & Bainus, 2017). Hal ini menjadikan keberadaan *Code of Conduct for the South China Sea (CoC)* sebagai salah satu hasil turunan DoC diperlukan untuk memperkuat kesepakatan yang telah dibentuk pada tahun 2002. Peralihan DoC ke CoC sebagai upaya dalam mengikat seluruh anggotanya untuk mematuhi kesepakatan serta membangun sikap saling menghargai dalam menyelesaikan konflik secara damai.

Proses pembentukan CoC menemui kendala dari China yang berupaya mengulur waktu perundingan. China tidak begitu suka dengan ASEAN yang ikut campur dalam menyelesaikan masalah Laut China Selatan (Pudjiastuti & Prayoga, 2015). Kekuatan China dalam mengulur waktu terlihat dari caranya menunda-nunda pembahasan CoC yang telah dibuat drafnya oleh Indonesia. China beranggapan bahwa dalam penyusunan CoC seharusnya didasarkan kesepakatan penuh terhadap isi DoC (Bangun, 2021). China juga mempengaruhi Kamboja untuk tidak memasukkan isu Laut China Selatan ketika menjadi ketua ASEAN tahun 2012 dalam kegiatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN 2012 (Darmawan, 2018).

Pembentukan CoC pada dasarnya merupakan implementasi dari adanya DoC yang telah dibentuk pada tahun 2002. Pembentukan CoC dimotori oleh Indonesia yang menyadari bahwa perlu adanya tata aturan bagi *claimant states* dalam bertindak di wilayah Laut China Selatan (Utomo, Prihantoro, & Adriana, 2017). Kemajuan pembahasan CoC terlihat dari dilaksanakannya pembacaan pertama (*first reading*) mengenai isi CoC antara ASEAN dengan China pada tahun 2019. Pembahasan berikutnya pada tahapan pembacaan kedua mengenai materi dari CoC dijadwalkan berlangsung empat kali di Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia dan China pada tahun

2020, tetapi tertunda akibat Covid-19 (Bangun, 2021).

Pemecahan masalah pada konflik Laut China melibatkan Indonesia yang memiliki kekuatan pada tataran regional ASEAN. Indonesia menginisiasi terbentuknya sebuah kerangka kerja yang dinamakan dengan *ASEAN Outlook on Indo Pacific (AOIP)*. Perumusan AOIP dapat dijadikan jalan tengah dalam mencegah hegemoni terhadap kawasan Indo Pasifik, khususnya Laut China Selatan yang selalu menemui permasalahan. Tidak hanya permasalahan konflik antara Amerika Serikat dengan China, setidaknya terdapat empat negara anggota ASEAN yang memiliki kepentingan pada sebagian bahkan seluruh area Pulau Spratly (Putri, 2018). Kehadiran ASEAN diharapkan dapat mencegah terjadinya hegemoni kawasan antara China dan Amerika Serikat.

Kehadiran AOIP yang diprakarsai oleh Indonesia diawali dengan memperkenalkan *an Indo-Pacific Framework for Mutually Beneficial Corporataion*. Gagasan yang disampaikan Indonesia ialah terbentuknya rasa saling percaya serta menumbuhkan sikap saling berdialog dalam menyelesaikan permasalahan (Yanuarti, Wibisono, & Midhio, 2020). Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Presiden Joko Widodo melobi anggota ASEAN untuk mendukung draf terkait AOIP. Hasil konsultasi ekstensif yang dilakukan dalam dan luar Indonesia dari tahun 2017 hingga 2018, Kementerian Luar Negeri Indonesia pada bagian Badan Pengkajian dan Perencanaan Kebijakan yang diketuai Siswo Pramono menghasilkan draf Pandangan Indonesia yang berjudul *ASEAN Outlook on Indo Pacific: Towards a Peaceful, Prosperous and Inclusive region* (Anwar, 2020).

Draf yang disampaikan oleh Indonesia mengenai AOIP mengalami keberhasilan dengan disetujuinya pada KTT ASEAN di Bangkok tahun 2019. Keseluruhan proses yang dilakukan oleh Indonesia telah menunjukkan peran serta kekuatan menengah (*middle power*) di kawasan ASEAN. Pembentukan AOIP mengandung empat elemen kunci yang terdiri dari pandangan terhadap kawasan Asia Pasifik dan Samudera Hindia sebagai area yang terintegrasi dengan ASEAN memainkan peran sentral yang strategis, kawasan Indo-Pasifik mengedepankan dialog serta kerjasama bukan rivalitas, pembangunan serta kesejahteraan diupayakan bagi seluruh anggota di Indo-Pasifik, dan pentingnya domain maritim dalam membangun arsitektur kawasan regional. Seluruh elemen yang tercantum dalam AOIP menegaskan bahwa ASEAN memiliki peran sentral dengan tetap memerankan sikap yang tidak berpihak pada salah satu kekuatan. Keberadaan ASEAN dalam meredakan ketegangan perebutan hegemoni di kawasan LCS berupaya menempatkan dirinya sebagai jalan alternatif dari dua kekuatan besar di kawasan.

4. KESIMPULAN

Tindakan China yang berupaya melakukan hegemoni atas Laut China Selatan dianggap sebagai sebuah pengulangan konsep *lebensraum* (ruang hidup) sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Jerman ketika perang dunia ke-2. Melalui penerapan kebijakan BRI, China berupaya menghubungkan jalur sutra tradisionalnya dengan menggunakan kekuatan militer serta diplomasi ekonominya kepada beberapa negara yang dilalui jalur tersebut. Proses hegemoni kawasan Laut China Selatan dipandang sebagai suatu keharusan dalam melancarkan kebijakan yang dicanangkan. Amerika Serikat memandang bahwa tindakan China sebagai ancaman kekuatan lamanya di dunia. Strategi *rebalancing* dengan menggandeng sekutu lama serta pembentukan QUAD digunakan sebagai langkah membendung hegemoni China di Laut China Selatan. Konflik yang terjadi antara dua kekuatan besar memicu ketegangan serta ketidakstabilan keamanan kawasan Laut China Selatan. Kehadiran ASEAN sebagai area yang bersentuhan langsung dengan Laut China Selatan menjadi jalan tengah meredakan ketegangan yang terjadi. Lahirnya CoC sebagai konsensus dalam bertindak di Laut China Selatan antara ASEAN dengan China serta AOIP yang telah disetujui menjadi langkah mencegah hegemoni kekuatan besar di kawasan. Tentu dengan lahirnya kerangka AOIP serta perjanjian pada tataran regional akan membawa babak baru dalam permasalahan perebutan hegemoni di kawasan Laut China Selatan.

5. REFERENSI

- Abrahamsson, C. (2013). On the Genealogy of Lebensraum. *Geographica Helvetica*, 68, 37–44. <https://doi.org/10.5194/gh-68-37-2013>
- Anshori, M. F. (2020). Balance of Threat of the Quadrilateral Security Dialogue towards China's Presence in the South China Sea. *AEGIS*, 4(1), 37–67. <https://doi.org/10.33021/aegis.v4i1.883>
- Anwar, D. F. (2020). Indonesia and the ASEAN outlook on the Indo-Pacific. *International Affairs*, 96(1), 111–129. <https://doi.org/10.1093/ia/iiz223>
- Bangun, B. H. (2021). Upaya dan Peran ASEAN Dalam Penyelesaian Sengketa Laut China Selatan. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 7(1), 23–37.
- Bassin, M. (1987). Imperialism and the Nation State in Friederich Ratzel's Political Geography. *Progress in Human Geography*, 11(4), 473–495. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/030913258701100401>
- Belo, Z. A., Mamentu, M., & Tulung, T. E. (2020). Kebijakan Luar Negeri Indonesia Dalam Menyelesaikan Masalah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Dengan Vietnam. *Jurnal Politico*, 9(2).
- Bidara, M. A., & Mamentu, M. (2018). Kepentingan Amerika Serikat Dalam Konflik Laut Cina Selatan. *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Calam, A., & Sobirin. (2009). Formulasi Geopolitik di Era Reformasi. *Jurnal Saintikom*, 7(2), 350–365.
- Carpio, A. T. (2020). China's Maritime Lebensraum. Retrieved March 14, 2020, from Inquirer.net website: <https://opinion.inquirer.net/129360/chinas-maritime-lebensraum>
- Cook, A. D. B. (2013). Smart Power Potential Under Xi Jinping. Retrieved March 14, 2021, from East Asia Forum website: <https://www.eastasiaforum.org/2013/03/07/smart-power-potential-under-xi-jinping/>
- Danielsson, S. K. (2009). Creating Genocidal Space: Geographers and the Discourse of Annihilation, 1880-1933. *Space and Polity*, 13(1), 55–68. <https://doi.org/10.1080/13562570902780944>
- Darmawan, A. B. (2018). Dinamika Isu Laut Tiongkok Selatan: Analisis Sumber-Sumber Kebijakan Luar Negeri Tiongkok Dalam Sengketa. *Pacis: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 14(1), 13–35.
- Darmawan, A. B., & Mahendra, Lady. (2018). Isu Laut Tiongkok Selatan: Negara-negara ASEAN Terbelah Menghadapi Tiongkok. *Jurnal Global & Strategis*, 12(1), 79. <https://doi.org/10.20473/jgs.12.1.2018.79-100>
- Djalal, D. P. (1986). *Geopolitical Concepts and Maritime Teritorial Behaviour in Indonesian Foreign Policy*. Simon Fraser University.
- Farhana, F. (2014). Memahami Perspektif Tiongkok Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Laut Cina Selatan. *Penelitian Politik*, 11(1), 167–180.
- Ferdinand, P. (2016). Westward ho- the China Dream and “One Belt, One Road”; Chinese Foreign Policy Under Xi Jinping. *International Affairs*, 4(92), 941–957.
- Foulkes, J., & Wang, H. (2019). China's Future Naval Base in Cambodia and the Implications for India. *China Brief*, 19(15). Retrieved from <https://jamestown.org/program/chinas-future-naval-base-in-cambodia-and-the-implications-for-india/>
- Gompert, D. C. (2013). *Sea Power and American Interest in the Western Pacific*. California: RAND Corporation.
- Haryanto, A., & Bainus, A. (2017). Implikasi Declaration of Conduct Laut Tiongkok Selatan Tahun 2002 Terhadap Proses Penyelesaian Sengketa. *Media Hukum*, 24(1), 88–95. <https://doi.org/10.18196/jmh.2017.0093.88-95>
- Heiduk, F., & Wacker, G. (2020). *From Asia-Pacific to Indo-Pacific: Significance, Implementation and Challenges*. Berlin.
- Hendrajit. (2017). Pergeseran Sentral Geopolitik

- Indonesia, dari Heartland ke Asia Pasifik. *Jurnal Kajian Lemhanas RI*, 5(1), 31–41.
- Jones, M., Jones, R., Woods, M., Whitehead, M., Dixon, D., & Hannah, M. (2015). *An Introduction to Political Geography: Space, Place and Politics* (2nd ed.). Oxon dan New York: Routledge.
- Kamal, H., Kamal, O., Idris, N. A., & Othman, Z. (2017). Peranan dan Tanggung Jawab Antarbangsa China sebagai Negara Berkuasa Besar. *Geografia Online: Malaysian Journal of Society and Space*, 12(7), 34–46.
- Kartini, I. (2015). Kebijakan Jalur Sutra Baru Cina dan Implikasi Bagi Amerika Serikat. *Kajian Wilayah*, 6(2), 131–147.
- Keating, T. J. (2008). United States Pacific Command: USPACOM Strategy. In *US Pacific Command*.
- Kien, L. T. (2020). As Tensions Rise Between China and the Quad Nations, ASEAN has the Ability to Leverage its Centrality and Encourage Peaceful Co-operation in the Region, Writes Regional Expert Le Trung Kien. Retrieved April 10, 2021, from Asialink website: <https://asialink.unimelb.edu.au/insights/the-indo-pacific-regional-architecture-the-quad,-inclusivity-and-asean-centrality>
- Kliem, F. (2020). Why Quasi-Alliances Will Persist in the Indo-Pacific? The Fall and Rise of the Quad. *Journal of Asian Security and International Affairs*, 7(3), 1–34. <https://doi.org/10.1177/2347797020962620>
- Leer, Y. van der, & Yau, J. (2016). *China's New Silk Route: The Long and Winding Road*. Retrieved from <https://www.pwc.com/gx/en/growth-markets-center/assets/pdf/china-new-silk-route.pdf>
- Mahan, A. T. (2010). The Influence of Sea Power Upon History 1660-1783. In *Cambridge University Press*. Cambridge: Cambridge University Press. <https://doi.org/http://doi.org/10.1017/CBO9780511783289>
- Malik, M. (2013). Historical Fiction: China's South China Sea Claims. *World Affairs*, 176(1), 83–90.
- Malthus, T. (1798). *An Essay on the Principle of Population*. London: Printed for J. Johnson, in St. Paul's Church-Yard.
- Mirski, S. (2015). The South China Sea Dispute: A Brief History. Retrieved March 14, 2021, from Lawfare website: <https://www.lawfareblog.com/south-china-sea-dispute-brief-history>
- Muhamad, S. V. (2020). Eskalasi Ketegangan di Laut China Selatan dan Sikap Asean. *Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*, 12(10).
- Patnistik, E. (2010). China Dituduh Meniru "Lebensraum" Nazi. Retrieved March 14, 2021, from Kompas.com website: <https://internasional.kompas.com/read/2010/11/01/07572584/China.Dituduh.Meniru..quot.Lebensraum.quot.Nazi?page=all>
- Planifolia, V. (2017). Strategi Rebalancing Amerika Serikat di Kawasan Asia-Pasifik. *Jurnal Hubungan Internasional*, 6(1). <https://doi.org/10.18196/hi.61101>
- Pudjiastuti, T. N., & Prayoga, P. (2015). ASEAN dan Isu Laut Cina Selatan: Transformasi Konflik Menuju Tata Kelola Keamanan Regional Asia Timur. *Jurnal Penelitian Politik*, 12(1), 99–115.
- Purwono. (2008). Studi Kepustakaan. *Info Persada*, 6(2), 66–72.
- Putri, S. A. (2018). Peran ASEAN Security Community Dalam Persengketaan Laut China Selatan (Studi Dari Tahun 1930 Hingga 2016). *Indonesian Journal of International Relations*, 2(2), 30–37.
- Rabbani, A. (2019). China's Hegemony In The South China Sea. *World Affairs: The Journal of International Issues*, 23(3), 66–79. Retrieved from 10.2307/48531051
- Rahmadani, S., Kusmanto, H., & Warjio. (2019). Strategi China menghadapi "Malacca Dilemma" dalam Rangka Pengamanan Jalur Energy China di Selat Malaka. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 11(1), 141–148.
- Ramadani, S., & Trisni, S. (2019). Analisis Kebijakan Luar Negeri Filipina Terkait Sengketa Laut Cina Selatan Pada Masa Duterte. *Intermestic: Journal of International Studies*, 4(1), 46–67. <https://doi.org/10.24198/intermestic.v4n1.4>
- Ratzel, F. (2019). The Laws of the Spatial Growth of States. In R. E. Kasperson & J. V Minghi (Eds.), *The Structure of Political Geography*. Boca Raton: Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315135267-4>
- Robbins, B. (2017). One Belt, One Road and the History of Maritime Silk Road. Retrieved March 15, 2021, from E-International Relations website: <https://www.e-ir.info/2017/03/26/one-belt-one-road-and-the-history-of-the-maritime-silk-route/>
- Satris, R. (2015). Peningkatan Anggaran Persenjataan Militer China sebagai Bagian dari Security Dilemma di Kawasan Asia Pasifik. *The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, 1(1), 95–104. Retrieved from <http://journal.unhas.ac.id/index.php/politics/article/view/137/0>
- Sigit, & Herindrasti, V. L. S. (Eds.). (2020). *Geopolitics and International Comtemporaru Issues in Asia Pacific and Beyond*. Jakarta: UKI Press.
- Snyder, H. (2019). Literature Review as a Research Methodology: An Overview and Guidelines. *Journal of Business Research*, 104(March),

- 333–339.
<https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Soebjijanto, S. (2004). Kekuatan Maritim Sebagai Salah Satu Pilihan Pembangunan Ketahanan Nasional Bangsa. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 9(2), 45–61.
- Storey, I. (2006). China's "Malacca Dilemma." In *China Brief* (Vol. 6). Retrieved from <https://jamestown.org/program/chinas-malacca-dilemma/>
- The State Council Information Office of the People's Republic of China. (2019). *China's National Defense in the New Era* (First Edit). Beijing: Foreign Language Press.
- Toruan, G. T. L. (2020). Peran Strategis Indonesia Dalam Penyelesaian Konflik Laut China Selatan Dalam Perspektif Stabilitas Keamanan Regional. *Jurnal Keamanan Nasional*, 6(1), 111–129.
- Utomo, H., Prihantoro, M., & Adriana, L. (2017). Peran Pemerintah Indonesia Dalam Mengelola Konflik Laut China Selatan. *Jurnal Prodi Damai Dan Resolusi Konflik*, 3(3), 63–88.
- Varacalli, T. F. X. (2016). National Interest and Moral Responsibility in the Political Thought of Admiral Alfred Thayer Mahan. *Naval War College Review*, 69(2), 108–127.
- Verianto, J. R. K. (2019). Kebangkitan China melalui Belt and Road Initiative dan (Re)konstruksi Hubungan Internasional dalam Sistem Westphalia. *Jurnal Hubungan Internasional*, 8(1), 1–11. <https://doi.org/10.18196/hi.81141>
- Waluyo, B. (2020). Cina dan Vietnam: Ketiadaan Konflik Terbuka di Laut Cina Selatan. *Jurnal Dinamika Global*, 5(2), 319–333.
- Yanuarti, I., Wibisono, M., & Midhio, I. W. (2020). Strategi Kerja Sama Indo-Pasifik Untuk Mendukung Pertahanan Negara: Perspektif Indonesia. *Jurnal Strategi Perahanan Semesta*, 6(1), 41–70.
- Yunus, A. (2018). 'One Belt, One Road': Sign of a Revisionist or Integrative China? Retrieved March 15, 2021, from E-International Relations website: <https://www.e-ir.info/2018/07/22/one-belt-one-road-sign-of-a-revisionist-or-integrative-china/>
- Zhang, F. (2015). Beijing's Master Plan for the South China Sea. Retrieved March 16, 2021, from Foreign Policy website: https://foreignpolicy.com/2015/06/23/south_china_sea_beijing_retreat_new_strategy/